

PENGURUSAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PADA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Yusuf Qohary; Agoes Inarto
Politeknik STIA LAN Jakarta

yusuf.qohary@gmail.com; agoes_virgo@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of managing foreign official trips at the Secretariat the Agency of Marine and Fisheries Research and Human Resources (BRSDM) starting from the planning process, knowing the types and conditions of foreign official travel and the mechanism for managing foreign official trips at BRSDM. The research was conducted using descriptive qualitative research methods. The data collection technique is done by reviewing documents and interviews with key informants. The interview technique in this study used semi-structured interviews.

Based on the results of this study, it is known that the management of foreign official trips from the aspect of planning, types and requirements, as well as the mechanism is still not optimal. Most of the overseas official trips were not included in the BRSDM's plan for overseas official travel needs. The BRSDM Secretariat needs to improve the function of planning foreign official trips by making a list of plans for overseas official trips for the following year. By making a list of plans for overseas official trips in the following year, the implementation of foreign official trips can be anticipated and the management process prepared and budget financing needs are prepared.

The BRSDM Secretariat needs to improve the function of planning foreign official trips by making a list of plans for overseas official trips for the following year. The BRSDM Secretariat must strictly impose sanctions on every BRSDM technical implementing unit that does not send a list of proposed overseas official travel plans for the following year and those who do not send overseas official travel reports and maximize evaluation activities.

Keywords: *official travel; overseas; planning*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dimulai dari proses perencanaan, mengetahui jenis dan syarat perjalanan dinas luar negeri serta mekanisme pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaahan dokumen dan wawancara kepada *key informant*. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa pengurusan perjalanan dinas luar negeri dari aspek perencanaan, jenis dan syarat, serta mekanisme masih belum maksimal. Sebagian besar perjalanan dinas luar negeri tidak masuk ke dalam rencana kebutuhan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM. Sekretariat BRSDM perlu meningkatkan kembali fungsi perencanaan perjalanan dinas luar negeri dengan membuat daftar rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun berikutnya. Dengan membuat daftar rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun berikutnya, maka pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dapat diantisipasi proses pengurusannya serta dipersiapkan kebutuhan pembiayaan anggarannya. Sekretariat BRSDM perlu meningkatkan kembali fungsi perencanaan perjalanan dinas luar negeri dengan membuat daftar rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun berikutnya. Sekretariat BRSDM harus tegas memberikan sanksi kepada setiap unit pelaksana teknis BRSDM yang tidak mengirimkan daftar usulan rencana perjalanan dinas luar negeri tahun berikutnya serta pelaksana perjalanan dinas luar negeri yang tidak mengirimkan laporan perjalanan dinas luar negeri serta memaksimalkan kegiatan evaluasi.

Kata Kunci: *perjalanan dinas; luar negeri; perencanaan*

PENDAHULUAN

Keterlibatan mitra kerja asing dalam kegiatan riset dan pengembangan sumber daya manusia akan membawa dampak positif bagi pengembangan kapasitas organisasi. Kolaborasi antara Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dengan mitra asing akan meningkatkan kemampuan dan pengalaman bagi pegawai/pejabat BRSDM. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai lingkup BRSDM melalui berbagai kegiatan diantaranya *capacity building (training, education, workshop, internship)*, *joint publication*, serta penugasan perjalanan dinas luar negeri untuk mengikuti forum resmi internasional

Pengertian perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, atau pihak lain yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia termasuk kunjungan di luar wilayah Republik Indonesia atas biaya negara dan/atau donor luar/dalam negeri dalam rangka mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan. Perjalanan dinas luar negeri harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip: i) selektif; ii) transparan; iii) efisien dan efektif; dan iv) memperhatikan ketersediaan anggaran. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2017 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017)

Pengurusan perjalanan dinas tidak terlepas dari aspek perencanaan yang baik. Perjalanan dinas luar negeri harus dilaksanakan sesuai daftar rencana perjalanan dinas luar negeri yang diusulkan ditahun sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tertib administrasi, efektif dan efisien serta mendukung kelancaran fungsi administrasi yang ada pada Sekretariat BRSDM, maka diperlukan mekanisme pengurusan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan BRSDM.

Proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang ada pada BRSDM saat ini dilakukan secara berjenjang dimulai dari pengusulan dari UPT kepada unit Eselon II Pembina Teknis (Pusat/Balai Besar) untuk kemudian Unit Eselon II Teknis (Pusat/Balai Besar) tersebut mengajukan usul kepada Kepala BRSDM dengan tembusan kepada Sekretaris BRSDM. Berdasarkan laporan perjalanan dinas luar negeri Tahun 2019 lingkup BRSDM, dari 48 UPT yang ada di BRSDM, hanya 1 UPT yang mengirimkan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada Sekretariat BRSDM. Sehingga dapat dikatakan perjalanan dinas luar negeri selama tahun 2019 hampir semua perjalanan dinas luar negeri yang terlaksana tidak tercantum dalam daftar perencanaan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM dimulai dari proses perencanaan, mengetahui jenis dan syarat perjalanan dinas luar negeri serta mekanisme pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM.

KAJIAN LITERATUR

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Jeremi, I. & Setyaningrum, D. (2020) yang meneliti tentang Analisis Pola Penyelewengan Beban Perjalanan Dinas Pada Kementerian Di Indonesia Tahun 2015-2017 mengambil kesimpulan bahwa pola jenis kasus terbesar dalam penyelewengan perjalanan dinas adalah penggunaan tarif perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. Pola jenis kasus tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab yang tidak optimal dari petugas-petugas yang berperan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tomisa, Muhamad Elsa, Nadrah (2019) yang meneliti tentang Pengaruh Perintah Perjalanan Dinas Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis mengambil kesimpulan bahwa perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 82 tahun 2017. Perintah perjalanan dinas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, nilai pengaruhnya yaitu sebesar 30,4% sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian dalam Islam, perjalanan dinas boleh-boleh saja dilakukan asal tidak melanggar aturan yang ada, walaupun tidak ada dalil yang menyebut secara khusus mengenai hal tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Adri, Ara Fa (2019) yang meneliti tentang rancang bangun sistem informasi perintah perjalanan dinas luar yang terintegrasi mengambil kesimpulan bahwa Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas bisa merekap data dan menyimpan dengan baik, mengawasi pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas, memberikan informasi kehadiran pegawai dalam perjalanan dinas dan memudahkan dalam menyusun anggaran dana perjalanan dinas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Susan Rachmawati et al. (2018) yang meneliti tentang optimalisasi sistem informasi perjalanan dinas dalam meningkatkan efisiensi biaya perusahaan mengambil kesimpulan bahwa dalam pengembangan aplikasi surat perintah perjalanan dinas dan rincian biaya perjalanan dinas, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya: a). mempermudah dalam pembuatan surat perintah perjalanan dinas; b). mengeluarkan biaya perjalanan dinas telah ditampilkan secara terinci sehingga memudahkan dalam pelaporan perjalanan dinas; c). meminimalkan duplikasi data karena data tersimpan dalam *database* sehingga efisiensi biaya tercapai; d). memudahkan dalam perencanaan perjalanan dinas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wati NL, Selfiana. (2016) yang meneliti tentang penanganan perjalanan dinas dalam negeri Pimpinan *Branch Human Resource Manager* PT Indofood *Consumer Branded Product* Sukses Makmur Tbk – Cibitung mengambil kesimpulan bahwa penanganan perjalan dinas bagi pimpinan mulai dari persiapan transportasi, persiapan akomodasi, dan persiapan keuangan telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fatimah Zahrah Br Surbakti (2016) yang meneliti tentang kerangka hukum pengaturan perjalanan dinas luar negeri pejabat atau pegawai Pemerintah Provinsi sebagai upaya peningkatan pembangunan mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pengurusan administrasi perizinan perjalanan dinas ke luar sudah diatur sebaik mungkin melalui perundang-undangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala.

Dari kajian literatur yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan membahas perjalanan dinas luar negeri. penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM dimulai dari proses perencanaan, mengetahui jenis dan syarat serta mekanisme pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaahan dokumen dan wawancara kepada *key informant*. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Prosedur pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek perencanaan merupakan suatu proses usulan rencana perjalanan dinas luar negeri yang disusun oleh masing-masing UPT untuk disampaikan kepada Sekretariat BRSDM untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar rencana perjalanan dinas luar negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas luar negeri. Berdasarkan penelaahan dokumen yang dilakukan peneliti, bahwa proses perencanaan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM belum memenuhi unsur-unsur perencanaan yang baik, sebab hampir seluruh UPT belum mengusulkan rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Padahal setiap akhir tahun sebelumnya, Sekretariat BRSDM sebenarnya telah membuat surat dinas bagi seluruh kepala UPT untuk dapat menyampaikan usulan perjalanan dinas luar negeri untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan wawancara *key informant*, pengusulan rencana perjalanan dinas luar negeri yang disampaikan oleh UPT, sangat bermanfaat dan membantu bagi Sekretariat BRSDM untuk menentukan pegawai/pejabat yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri serta memperkirakan kebutuhan pembiayaan anggaran perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM. Selanjutnya, Subkoordinator Kerja Sama berkoordinasi lebih lanjut dengan Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Pegawai di BRSDM untuk menentukan apakah pejabat/pegawai yang diusulkan sudah sesuai dengan kompetensi dan tusinya masing-masing. Pada tahun 2019, proses pengumpulan data berupa rencana perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM tidak berjalan dengan baik, karena hanya 1 UPT yang mengirimkan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada Sekretariat BRSDM.

1. Aspek Perencanaan

Adapun aspek perencanaan perjalanan dinas luar negeri dibagi menjadi lima sub aspek yaitu: a) waktu pelaksanaan, b) nama kegiatan, jumlah delegasi, d) kota/negara tujuan; dan e) pembiayaan. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan wawancara para *key informant*, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) **waktu pelaksanaan**, Berdasarkan hasil telaah dokumen yang dilakukan peneliti pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2017 serta memorandum Usulan Rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan BRSDM bahwa dalam pengusulan rencana perjalanan dinas luar negeri memerlukan data berupa waktu pelaksanaan perjalanan dinas. Waktu pelaksanaan perjalanan dinas sangat penting untuk disampaikan sebab hal tersebut berkaitan dengan waktu pengurusan dokumen kelengkapan (memerlukan koordinasi dengan unit kerja dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri). Berdasarkan wawancara *key informant*, waktu pengajuan perjalanan dinas luar negeri paling cepat i) 10 hari kerja sebelum keberangkatan untuk negara asing yang tidak memerlukan visa; ii) 17 hari kerja sebelum keberangkatan untuk negara asing yang memerlukan visa; iii) 24 hari kerja sebelum keberangkatan untuk negara asing yang memerlukan visa *Schengen* dan merupakan negara anggota Uni Eropa (sesuai Tabel 4). Berdasarkan wawancara peneliti (daftar pertanyaan terlampir) menjelaskan bahwa waktu keberangkatan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan pada H-1 sebelum keberangkatan tergantung jarak tempuh dan waktu perjalanan dinas pelaksana perjalanan dinas luar negeri. Sedangkan hambatan yang dihadapi biasanya ada beberapa dokumen kelengkapan perjalanan dinas luar negeri yang belum dilengkapi. Sekretariat BRSDM selalu berupaya melakukan koordinasi secara intensif dengan pengelola perjalanan dinas luar negeri yang ada di lingkup UPT agar dapat melengkapi kekurangan dokumen dimaksud. Namun demikian, Sekretariat BRSDM berhak mempertimbangkan kembali pengusulan rencana

perjalanan dinas luar negeri yang waktu pengusulannya mendekati waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Oleh karena itu, setiap pengusulan perjalanan dinas luar negeri, harus menyampaikan usulan perjalanan dinas luar negeri jauh hari sebelum waktu keberangkatan, supaya ada waktu yang cukup untuk koordinasi dengan unit kerja dari K/L lain;

- b) **nama kegiatan**, berdasarkan hasil telaah dokumen yang dilakukan peneliti pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2017 serta berdasarkan informasi *key informant*, nama kegiatan perjalanan dinas sangat penting untuk disampaikan sebab hal tersebut berkaitan dengan jenis perjalanan dinas luar negeri yang akan diusulkan. Berdasarkan informasi *key informant*, sebagian besar yang mengusulkan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM yaitu paling banyak untuk kegiatan pelatihan dan penugasan sebagai peneliti/dosen/widyaiswara serta penugasan sebagai Delegasi Republik Indonesia (*official visit*). Nama kegiatan juga membantu Sekretariat BRSDM untuk melakukan identifikasi dan verifikasi kompetensi pejabat/pelaksana perjalanan dinas luar negeri yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri. Mengingat perjalanan luar negeri harus berpedoman pada prinsip perjalanan dinas luar negeri yaitu selektif, maka Sekretariat BRSDM juga harus memastikan nama kegiatan perjalanan dinas luar negeri dimaksud guna melakukan identifikasi dan verifikasi sesuai dengan berkas pengajuannya;
- c) **jumlah delegasi**, berdasarkan hasil telaah dokumen yang dilakukan peneliti pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2017 serta berdasarkan informasi *key informant*, jumlah delegasi perjalanan dinas sangat penting untuk disampaikan sebab hal tersebut berkaitan dengan salah satu prinsip pelaksanaan perjalanan dinas yaitu selektif. Adapun delegasi yang dimaksud yaitu PNS atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, untuk mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia pada pertemuan bilateral, multilateral, atau regional bidang kelautan dan perikanan di luar negeri. Delegasi wajib menyampaikan kertas posisi sebab dalam pertemuan tersebut delegasi akan menyampaikan naskah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang disusun dengan tujuan memperkuat peran dan posisi di bidang kelautan dan perikanan. Sekretariat BRSDM juga wajib memastikan jumlah delegasi yang diberangkatkan merupakan pegawai/ pejabat yang tepat karena pegawai/pejabat tersebut merupakan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Berdasarkan Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019, rekapitulasi jumlah delegasi perjalanan dinas luar negeri selama tahun 2019 berjumlah 144 orang terdiri dari 27 delegasi penugasan sebagai *keynote speaker*, dan *senior official meeting* serta 117 delegasi penugasan sebagai peserta pelatihan. (*sumber: BRSDM, 2019 diolah peneliti*);
- d) **kota/negara tujuan**, berdasarkan hasil telaah dokumen yang dilakukan peneliti pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2017 serta berdasarkan informasi *key informant*, kota/negara tujuan perjalanan dinas sangat penting untuk disampaikan sebab hal tersebut berkaitan dengan waktu pengurusan dokumen kelengkapan (memerlukan koordinasi dengan unit kerja dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri) yang memerlukan waktu minimal pengajuan perjalanan dinas. Hambatan yang dihadapi dalam hal perubahan negara/kota tujuan perjalanan dinas luar negeri, pengusul perjalanan dinas luar negeri sudah memberitahukan hal tersebut kepada Sekretariat BRSDM tentang perubahan negara/kota penyelenggara dengan melampirkan bukti dukung surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara kegiatan. Dalam rangka mendukung kelancaran proses administrasi pengurusan perjalanan dinas luar negeri, maka para pelaksana perjalanan dinas luar negeri wajib berkoordinasi secara kooperatif

informatif agar pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas luar negeri berjalan dengan baik dengan mencantumkan nomor telepon serta alamat surat elektronik aktif. Hal tersebut bertujuan agar pemberitahuan dapat langsung diterima oleh pelaksana perjalanan dinas luar negeri.

Tabel 1.
Rekapitulasi Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup BRSDM berdasarkan kota/negara tujuan periode Agustus 2018 S.D. Desember 2019

No.	Kota/Negara Tujuan	Jumlah
1	Amerika Serikat	4
2	Australia	29
3	Chile	1
4	Filipina	6
5	India	3
6	Italia	3
7	Jepang	36
8	Jerman	2
9	Kamboja	7
10	Kanada	1
11	Kenya	1
12	Korea Selatan	3
13	Laos	10
14	Madagaskar	2
15	Malaysia	4
16	Maroko	2
17	Norwegia	6
18	Perancis	7
19	Puerto Rico	1
20	Tiongkok	7
21	Skotlandia	3
22	Seychelles	1
23	Taiwan	3
24	Thailand	26
25	Vietnam	12

Sumber: Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, 2019

- e) **pembiayaan**, berdasarkan hasil telaah dokumen yang dilakukan peneliti, komponen pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dibagi menjadi dua kategori yaitu pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun dari donor (mitra kerja sama luar negeri). Perbandingan sumber pembiayaan perjalananan dinas luar negeri tahun 2019 yang tercatat terdiri dari pembiayan yang bersumber dari APBN sejumlah Rp. 1.397.508.487 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sementara pembiayan yang bersumber dari mitra kerja sama luar negeri BRSDM berjumlah Rp. 4.440.427.500 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). (*sumber:* BRSDM, 2019, data diolah peneliti). Hal tersebut menunjukkan bahwa BRSDM memiliki daya tarik tersendiri bagi mitra kerja sama luar negeri. Terbukti jumlah pembiayaan yang diberikan oleh mitra kerja sama luar negeri berjumlah tiga kali lipat dari pembiayaan yang bersumber dari penggunaan APBN. Menurut hasil penelaahan dokumen dan wawancara para *key informant* terhadap aspek perencanaan dimulai dari waktu pelaksanaan, nama

kegiatan, jumlah delegasi, kota/negara tujuan, dan pembiayaan dapat dianalisis bahwa, perencanaan perjalanan dinas luar negeri belum sesuai dengan aspek perencanaan dikarenakan sebagian besar belum menyampaikan informasi perencanaan perjalanan dinas luar negeri tahun berikutnya. Namun demikian, untuk penyampaian kelengkapan dokumen perjalanan dinas luar negeri sudah cukup lengkap dan dapat diproses lebih lanjut berjalan lancar dan tanpa kendala.

Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik sintesis, bahwa pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM dari aspek perencanaan menunjukkan bahwa belum memenuhi perencanaan yang baik, namun pada umumnya pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri belum direncanakan jauh hari sebelumnya, sehingga banyak perjalanan dinas luar negeri yang bersifat mendadak (tanpa ada perencanaan sebelumnya).

2. Aspek Jenis dan Syarat

Hasil penelitian yang terkait dengan aspek jenis dan syarat terbagi menjadi tiga sub aspek, yaitu: a) Jenis Perjalanan Dinas Luar Negeri, b) Persyaratan Umum, dan c) Persyaratan Khusus. Berdasarkan hasil penelahaan dokumen dan wawancara dengan beberapa *key informant*, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) **jenis perjalanan dinas luar negeri**, Jenis perjalanan dinas luar negeri yang dibedakan berdasarkan kegiatannya yang terdiri dari:
- i. pertemuan bilateral, regional, dan multilateral;
 - ii. seminar/lokakarya/workshop/simposium;
 - iii. pameran/promosi/expo;
 - iv. tugas belajar;
 - v. pelatihan;
 - vi. studi banding;
 - vii. penugasan sebagai tenaga ahli atau peneliti;
 - viii. penugasan sebagai staf perwakilan;
 - ix. penugasan sebagai narasumber;
 - x. penugasan dalam rangka pengawasan bersama dengan negara sahabat;
 - xi. penugasan dalam rangka inspeksi karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan bersama dengan negara mitra;
 - xii. penugasan dalam rangka penyelesaian dan/atau advokasi masalah hukum di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - xiii. penugasan khusus untuk keadaan mendesak atas perintah Menteri

Berdasarkan hasil telaah dokumen Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup BRSDM Tahun 2019, terdapat 144 perjalanan dinas luar negeri yang terdiri dari beberapa macam substansi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 2.
Rekapitulasi Substansi Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup BRSDM
Tahun 2019

Substansi Perjalanan Dinas Luar Negeri	Jumlah
Riset dan Pengembangan SDM KP	12
Riset Kelautan	29
Riset Perikanan	76
Pendidikan	16
Pelatihan dan Penyuluhan	3
Sosial Ekonomi	4
Pengolahan Produk dan Bioteknologi	4
Jumlah	144

Sumber: BRSDM, 2019

Tabel 3.
Rekapitulasi Jenis Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup BRSDM
Tahun 2019

Jenis Perjalanan Dinas Luar Negeri	Jumlah
<i>Senior Official Meeting/ Technical Meeting/ Scientific Meeting/ Global Initiative</i>	73
<i>Training/Workshop</i>	56
<i>Courtesy Call/Official Visit/Keynote Speaker</i>	15
Jumlah	144
<i>Sumber: BRSDM, 2019</i>	

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan *key informant* (daftar pertanyaan terlampir) setiap pengusulan perjalanan dinas, perlu dilakuka analisa terhadap usulan perjalanan dinas luar negeri. Jenis perjalanan dinas luar negeri perlu dibuat analisa supaya dapat dibedakan kegiatannya dan memastikan pejabat/pegawai yang tepat untuk ditugaskan. Kendala yang sering terjadi bahwa beberapa pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai antara pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dengan bidang kepakaran serta tugas dan fungsinya. Untuk menghadapi hambatan tersebut, Sekretariat BRSDM akan menyiapkan surat pemberitahuan menegenai hal tersebut kepada unit kerja pengusul.

- b) **persyaratan umum**, berdasarkan hasil telaahan dokumen Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup BRSDM Tahun 2019, sebagian besar pengurusan perjalanan dinas luar negeri di BRSDM pada tahun 2019 belum memenuhi persyaratan umum yaitu telah masuk dalam daftar rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian atau telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Menteri. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pengusulan perjalanan dinas bersifat insidental (penugasan yang mendadak oleh Pimpinan). Oleh karena itu, Sekretariat BRSDM melakukan analisa kembali terkait pengusulan perjalanan dinas luar negeri tersebut dan memastikan setiap pengusulan perjalanan dinas luar negeri, jenis dan persyaratan perjalanan dinas luar negeri sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Namun demikian perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM sudah memenuhi persyaratan umum lainnya yaitu terdapat permintaan/undangan dari Kementerian/Lembaga atau negara/lembaga internasional/ organisasi internasional/ penyelenggara kegiatan, kemudian telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja, dan tersedia alokasi sumber pembiayaan yang bersumber baik dari APBN maupun Lembaga Donor (mitra kerja sama luar negeri BRSDM).
- c) **persyaratan khusus**, berdasarkan hasil telaah dokumen Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup BRSDM Tahun 2019, sebagian besar pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada tahun 2019 sudah memperhatikan persyaratan khusus yang diperlukan dalam pengurusan perjalanan dinas luar negeri. Persyaratan khusus perjalanan dinas luar negeri yang ada pada BRSDM misalnya Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kegiatan pertemuan bilateral, regional, dan multilateral, sebagaimana dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan:
- i. dalam rangka peninjauan, peningkatan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan; dan dilaksanakan oleh Delegasi Kementerian
 - ii. Seluruh perjalanan dinas seperti Seminar, Lokakarya, Simposium, Pameran, Promosi, Expo, Tugas Belajar, Pelatihan, Penugasan sebagai Tenaga Ahli (Melakukan Riset/Survey) membutuhkan rekomendasi yang dikeluarkan Biro

Sumber Daya Manusia Aparatur, sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut oleh BHKLN kepada Kementerian Sekretariat Negara.

- iii. Perjalanan Dinas LN yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat lainnya lingkup BRSDM wajib dilaksanakan dengan menggunakan Paspur Dinas.
- iv. Penggunaan Paspur Umum akan menjadi Bahan Pertimbangan (catatan) dalam Pengajuan Perdin LN selanjutnya

Oleh karena itu, Pejabat/pegawai yang memenuhi persyaratan khusus yaitu pejabat/pegawai yang memiliki bidang tugas dan fungsi, kompetensi, dan keterkaitan dengan substansi yang akan dibahas. Menurut wawancara dengan salah satu *key informant*, bahwa setiap pengusulan pengurusan perjalanan dinas yang masuk ke Sekretariat BRSDM, telah dilakukan pengecekan kembali jenis-jenis perjalanan dinas agar memudahkan dalam pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan wawancara para *key informant* terhadap aspek jenis dan persyaratan perjalanan dinas luar negeri dapat dianalisis, bahwa sebagian besar belum memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dipersyaratkan. Namun demikian Sekretariat BRSDM tetap dapat memberikan pelayanan pengurusan perjalanan dinas luar negeri kepada semua pejabat/pelaksana di lingkup BRSDM dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan kesesuaian tugas masing-masing pejabat/pegawai serta memperhatikan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam perjalanan dinas luar negeri selama dalam persetujuan Pimpinan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat ditarik sintesis bahwa pelaksanaan Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada BRSDM dari aspek jenis dan persyaratan untuk sub aspek jenis perjalanan dinas luar negeri, sub aspek persyaratan umum, dan sub aspek persyaratan belum berjalan maksimal. Secara khusus perlu meningkatkan kembali fungsi perencanaan perjalanan dinas luar negeri, sehingga pengurusan perjalanan dinas luar negeri tidak bersifat mendadak karena sudah direncanakan sebelumnya.

3. Aspek Mekanisme

Mekanisme pengurusan perjalanan dinas luar negeri merupakan suatu alur proses pengusulan perjalanan dinas luar negeri mulai dari penyampaian usulan dan analisa, terjadi perubahan/pembatalan perjalanan dinas luar negeri, serta pelaporan dan evaluasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Hasil penelitian yang terkait dengan aspek mekanisme dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: a) sub aspek penyampaian dan analisa usulan rencana, b) sub aspek perubahan/pembatalan perjalanan dinas luar negeri, dan c) sub aspek pelaporan perjalanan dinas luar negeri.

- a) Penyampaian dan analisa usulan rencana, berdasarkan wawancara dengan *key informant*, Sekretariat BRSDM mengumpulkan usulan rencana perjalanan dinas luar negeri dari seluruh UPT lingkup BRSDM untuk kemudian dilakukan identifikasi dan analisa usulan rencana untuk kemudian disampaikan kepada unit kerja Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri, paling lambat bulan Desember sebelum tahun berjalan. Menurut wawancara dengan *key informant*, tahap penyampaian usulan rencana perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM hampir seluruh UPT belum menyampaikan usulannya, sehingga Sekretariat BRSDM tidak dapat menyampaikan usulan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada BHKLN. Hal ini tentu saja mengakibatkan sebagian besar perjalanan dinas luar negeri belum memenuhi salah satu persyaratan umum perjalanan dinas luar negeri yaitu belum masuk dalam daftar rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian atau telah mendapatkan

- persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Menteri. Bahkan ada pengurusan perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara mendadak (tidak ada dalam daftar rencana).
- b) Perubahan/pembatalan perjalanan dinas luar negeri, berdasarkan wawancara dengan *key informant*, dalam hal terjadi perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri, pihak pengusul perjalanan dinas luar negeri sudah menyampaikan usulan perubahan atau pembatalan tersebut kepada Sekretariat BRSDM dengan memuat alasan perubahan atau pembatalan disertai dengan melampirkan salinan surat persetujuan penugasan perjalanan dinas luar negeri sebelumnya, sehingga proses perubahan/pembatalan perjalanan dinas luar negeri dapat diusulkan diusulkan kembali untuk kemudian diproses lebih lanjut.
- c) Pelaporan dan evaluasi perjalanan dinas luar negeri, berdasarkan wawancara dengan *key informant* dan hasil telaah dokumen, mayoritas pejabat/pelaksana yang telah selesai melakukan perjalanan dinas luar negeri belum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala BRSDM. Pada tahun 2019, dari 144 jumlah perjalanan dinas luar negeri, hanya 69 laporan perjalanan dinas luar negeri yang mengumpulkan laporan perjalanan dinas luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan Kepala BRSDM bagi pelaksana perjalanan dinas luar negeri yang belum menyampaikan laporan perjalanan dinas luar negeri sebelumnya, kepada seluruh pelaksana perjalanan dinas luar negeri yang belum melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, Sekretariat BRSDM mengambil kebijakan untuk mempertimbangkan kembali usulan perjalanan dinas luar negeri berikutnya. Evaluasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan Sekretariat BRSDM paling sedikit setiap enam bulan sekali dengan melakukan analisa keterkaitan antara tujuan, pelaksanaan dan hasil perjalanan dinas luar negeri yang telah dilaksanakan dengan mengundang BHKLN dan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai narasumber. Namun berdasarkan telaah dokumen Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Tahun 2019, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri BRSDM pada tahun 2019 hanya dilakukan satu kali selama satu tahun yaitu pada bulan November Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan wawancara para *key informant* terhadap aspek mekanisme dapat dianalisis, bahwa mekanisme perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM belum berjalan dengan baik. Penyampaian usulan rencana yang belum dilakukan mengakibatkan pengurusan perjalanan dinas luar negeri menjadi tergesa-gesa karena faktor waktu pengurusan yang kurang memadai. Namun demikian dalam hal terjadi perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM, telah dilakukan penanganan yang tepat dengan segera mungkin membuat surat pemberitahuan terjadi perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM juga belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih terdapat pelaksana perjalanan dinas belum menyerahkan laporan perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala BRSDM serta pelaksanaan evaluasi perjalanan dinas baru dilaksanakan satu kali dalam setahun.
- Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik sintesis, bahwa pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM dari aspek mekanisme masih belum maksimal. Namun demikian, seluruh usulan perjalanan dinas luar negeri yang masuk ke Sekretariat BRSDM telah dilakukan analisa terhadap usulan perjalanan dinas luar negeri dan juga melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perjalanan dinas luar negeri yang ada serta memperhatikan waktu penyampaian usulan perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa pelaksanaan Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada BRSDM belum berjalan secara maksimal karena sebagian besar perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan tidak masuk dalam daftar perencanaan kebutuhan perjalanan dinas luar negeri. Padahal setiap akhir tahun sebelumnya, Sekretariat BRSDM sebenarnya telah membuat surat dinas bagi seluruh kepala UPT untuk dapat menyampaikan usulan perjalanan dinas luar negeri untuk tahun berikutnya.

Sekretariat BRSDM belum memiliki formulasi untuk menentukan apakah pejabat/pegawai yang diusulkan sudah sesuai dengan kompetensi dan tusunya masing-masing. Adapun kesimpulan secara terperinci untuk masing-masing aspek dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Aspek Perencanaan

Pada aspek perencanaan, dimulai dari waktu pelaksanaan, nama kegiatan, jumlah delegasi, kota/negara tujuan, dan pembiayaan dapat dianalisis bahwa, perencanaan perjalanan dinas luar negeri belum sesuai dengan aspek perencanaan dengan sebagian besar belum menyampaikan informasi usulan rencana perjalanan dinas luar negeri tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun demikian untuk penyampaian kelengkapan dokumen perjalanan dinas luar negeri sudah cukup lengkap dan dapat diproses lebih lanjut tanpa kendala. Maka dapat disimpulkan bahwa pengurusan perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM dari aspek perencanaan menunjukkan bahwa belum memenuhi perencanaan yang baik.

2. Aspek Jenis dan Persyaratan

Pada aspek jenis dan persyaratan, bahwa jenis perjalanan dinas luar negeri, sebagian besar belum memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dipersyaratkan. Namun demikian Sekretariat BRSDM tetap dapat memberikan pelayanan pengurusan perjalanan dinas luar negeri kepada semua pejabat/pelaksana di lingkup BRSDM dengan tetap memperhatikan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam perjalanan dinas luar negeri dengan persetujuan Pimpinan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas luar negeri dilihat dari aspek jenis dan syarat belum berjalan maksimal.

3. Aspek Mekanisme

Pada aspek mekanisme, menunjukkan bahwa mekanisme perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM belum maksimal. Penyampaian usulan rencana perjalanan dinas luar negeri yang belum dilakukan mengakibatkan proses pengurusan perjalanan dinas luar negeri menjadi tergesa-gesa karena faktor waktu pengurusan yang kurang memadai. Namun demikian dalam hal terjadi perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM, telah dilakukan penanganan yang tepat dengan segera mungkin membuat surat pemberitahuan terjadi perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri. Pada tahun 2019, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM belum berjalan secara maksimal dikarenakan baru sekitar 69 dari 144 (sebesar 50%) pelaksana perjalanan dinas yang telah menyerahkan laporan perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala BRSDM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, peneliti dapat menyampaikan saran-saran pada BRSDM sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan

Sekretariat BRSDM harus membuat perencanaan perjalanan dinas luar negeri yang baik dengan melibatkan Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Pegawai guna mencari formulasi yang tepat untuk menentukan apakah usulan perjalanan dinas luar negeri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perjalanan dinas luar negeri. Sekretariat BRSDM perlu menunjuk operator khusus yang menangani perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM.

2. Aspek Jenis dan Syarat,
Sekretariat BRSDM harus lebih selektif dan mempertimbangkan kembali serta berhak untuk tidak memproses lebih lanjut setiap pengusulan perjalanan dinas luar negeri dari UPT yang tidak menyampaikan usulan rencana perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat BRSDM di tahun sebelumnya dan memastikan bahwa pelaksana perjalanan dinas merupakan orang yang tepat sesuai dengan kompetensinya.
3. Aspek Mekanisme
Sekretariat BRSDM harus tegas dengan tidak memproses lebih lanjut pengusulan perjalanan dinas luar negeri dari UPT yang tidak mengirimkan usulan rencana perjalanan dinas luar negeri pada tahun sebelumnya. Sekretariat BRSDM juga harus berani memberikan sanksi tegas bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Kepala BRSDM sesuai peraturan kedisiplinan yang berlaku. Selanjutnya, Sekretariat BRSDM juga harus melaksanakan kegiatan evaluasi perjalanan dinas luar negeri lingkup BRSDM setiap semester tahun berjalan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan memberikan masukan bagi Kepala BRSDM untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, Ara Fa (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Yang Terintegrasi. Skripsi
- Afandi, P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
- Cooper and Schindler. (2014). *Bussines Research Method*. New York: Mc Graw- Hill
- Fahmi, I. (2015). Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Handoko, T. Hani. (2012). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPF
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempat belas, Jakarta: Bumi Aksara
- Jeremi, I. & Setyaningrum, D. (2020). Analisis pola penyelewengan beban perjalanan dinas pada kementerian di indonesia tahun 2015-2017. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 255-272
- Kamaluddin, Apiaty. (2017). Administrasi Bisnis. Makassar: CV Sah Media
- Liyana Wati, Noer dan Selfiana, (2016), Menagani Perjalanan Dinas dalam Negeri Pimpinan *Branch Human Resources Manager* PT Indofood *Consumer Branded Product* Sukses Makmur, Tbk. Cibitung: P2M ASM Bina Insani
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nawawi, Hadari. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada *University Press*
- Nitisemito, Alex S. (2012). *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*. Jakarta Arena Ilmu
- Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/PER-BRSDM/2021 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021-2024 Sebagai Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021-2024
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2017 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri
- Rachmawati, S., Retnasari, T., & Sunarto, S. (2018). Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan. *JURNAL TEKNOLOGI DAN ILMU KOMPUTER PRIMA (JUTIKOMP)*, 1(2), 241-249
- Sadono, Sukirno. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Raja Grasindo Persada.
- Sedianingsih, (2010). *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- STIA LAN Jakarta. (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Sarjana Terapan*. Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Fatimah Zahrah Br, (2016). *Research Law Journal* Vol 11, No 2. Kerangka Hukum Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat atau Pegawai Pemerintah Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan. Universitas Negeri Semarang.
- Tomisa, Muhamad Elsa, Nadrah (2019). Pengaruh Perintah Perjalanan Dinas Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Desember 2019, Vol.8, No.2: 237-249